**FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MAWAI INDAH KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sukma Maharani, S.Ap

Npm 17 11 1001 3509 056

Program Studi, Ilmu Administrasi Publik

Jurusan, Administrasi Publik

Fakultas, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

Sukma Maharani, Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar. Dibawah bimbingan Ibu Salasiah S.Sos, M.Si Sebagai Pembimbing I dan Ibu Raudah Mahmud S.Ag, M.Hi Sebagai Pembimbing II.

 Kepala desa sebagai penentu kebijakan dan memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana pembangunan, kepala desa sebagai pemimpin terdepan dan sebagai pemerintahan yang paling dekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Disamping itu sebagai pemimpin, kepala desa juga memiliki fungsi sebagai pelopor, penggerak, perencana, penggegas, bahkan sebagai pelaksana pembangunan didesa yang dipimpinnya.

 Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam menginterprestasikan data tentang variabel, bersifat non kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluar terhadap fenomena. Metode yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

 Adapun temuan dari penelitian ini yaitu fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa memfokuskan infrastruktur dasar seperti, PLN dan Air bersih, selain infrastrutur dasar desa juga ingin mewujudkan hasil panen bukan lagi berupa bahan mentah melainkan hasil olahan.

**Kata Kunci: Fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan**

**ABSTRACT**

Sukma Maharani The Function of Village Head in Implementing Development in Mawai Indah Village, Batu Ampar District. Under the Guidance of Mrs. Salasiah S.Sos, M.Si as mentor I and Mrs. Raudah Mahmud S.Ag, M.Hi as mentor II.

 The Head of Village as a responsibility as the implementer of the development of the Village Head as the leading leader and directly related to the community. In addition, as a leader, the Village head also has function as a pioneer, even as the executor of the development of the village the leads.

 Data analysis in this study is qualitative based on the use of complete and in-depth information to interpret data on variables, non-quantitative and intended to conduct in-depth exploration and not to expand on phenomena. The method used is by interview, observation and documentation methods.

 The findings of this study are the function of the village head in the implementation of village development focusing on basic infrastructure such as PLN and Clean Water, in addition to the harvest is no longer in the form of raw materials but processed products.

**Keywords: The function of the Village Head in implementing development**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, keberadaan desa seakan timbul tenggelam dalam arus gelombang politik enzim yang berkuasa. Pada hal sejarah menunjukkan bahwa desa jauh lebih eksis sebelumnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adatdalam ikatan pola administrasi pemerintah, ekonomi dan sosiologis yang mandiri sebagai wujud dari otonomi asli, yang berasal dari asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dengan berbagai tuntutan perubahan dan perkembangan yang dihadapi saat ini, dan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan khususnya pemerintah desa. Agar meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakatnya untuk bersaing disegala bidang kehidupan.

Menghadapi perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan pemerintahan didaerah. Dengan memberikan kewenanganyang luas, nyata dan tanggung jawab kepada daerah secara profesional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional,serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang ditunjukkan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan maka kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaan meningkat.

Menurut S.P Siagian, (2006:12) pembangunan merupakan suatu usaha untuk serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dari pembangunan dalam rangka pembinaan bangsa. Pendapat diatas menjelaskan pembangunan merupakan suatu usaha perubahan kearah kehidupan yang layak dan lebih baik yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

**KERANGKA DASAR TEORI**

**2.1 Teori dan Konsep**

 Menurut Siswoyo (dalam mardalis, 2003 :42) teori diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramaikan fenomena.

 Menurut Erwan dan Dyah 2007 teori menurut definisinya ialah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamati secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian.

 Menurut Siswoyo konsep yaitu seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramaikan fenomena.

 Menurut Mory Cooper ialah semua kumpulan konsep, definisi, proposisi dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah di generalisasikan sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu.

 Menurut Singarimbun dan effendi (2009) konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud kita memakainya.

**Teori Kebijakan**

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin, akar kata policy dalam bahasa yunani dan sansekerta yaitu polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan pada akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan (Dunn 2003 : 51).

Kata kebijakan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan dan cara bertindak mengenai pemerintahan, kemahiran dan kebijaksanaan. Berdasarkan definisi yang terdapat dalm Kamus Umum Bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagaii berikut :

“Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”.

 Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

 Menurut Carl Friedrich dalam wahab (2008:3) kebijakan adalah suatu tundakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

**Teori Kebijakan Publik**

Di dalam proses administrasi kita dapati banyak sekali keputusan yang merupakan *public policy*. Oleh karena itudalam mempelajari ilmu administrasi sesungguhnya kita tidak dapat lepas pula dari studi kebijakan publik. Prinsip tersebut akan di tinjau lebih lanjut dari pengertian kebijakan publik dari para ahli.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita melihat beberapa konsep kunci yang memuat dalam kebijakan public menurut Young dan Quinn dan Suharto (2005:44), antara lain :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkatan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukan lah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan public bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya “tidak” memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang actor. Kebijakan public berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan oleh kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh perwakilan lembaga yang berwenang.

Dunn ( Nugroho ; 2003 ; 22 ) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekpresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki.

Berkaitan dengan pengertian kebijakan publik, terdapat beberapa karakteristik atau ciri utama tentang kebijakan public yang disampaikan oleh David Easton dalam Wahab (2008:6) bahwa ciri yang melekat pada kebijakan-kebijakan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Hal tersebut membawa implikasi tertentu terhadap kebijakan publik, anatara lain :

1. Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan mungkin bersifat positif, mungkin pula bersifat negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijkan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejababat pemerintah untuk tidak bertindak.

**2.1.1 Pengertian Desa dan Kepala Desa**

Kata “desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe seorang Belanda yang merupakan pembantu gubernur Inggris yang menyebut tentang adanya desa-desa didaerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari juga desa-desa dikepulauan luar jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. (Soetarjo, dalam Sadu Wasistono, 2007 : 7).

 Menurut Yulianti (2003 :24) mengatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negara asal, atau tanah leluhur yang berujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai dengan penjelasan diatas jelaslah bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang masih asli adat tradisinya, sosial kemasyarakatannya masih murni, dan rasa semangat kegotong-royongannya sangat kuat yang dipimpin seorang kepala desa sebagai satu kesatuan hidup dan dengan kesatuan norma. Serta memiliki wilayah hukum yang jelas dengan memiliki batas-batas yang sah. Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan suku bangsa banyak kita jumpai istilah-istilah desa, diantaranya seperti Dusun bagi masyarakat Sumatera tengah dan Selatan, Dati bagi masyarakat Maluku, Nagari bagi masyarakat Minng Kabau, dan Wanua bagi masyarakat Minahasa.

 Menurut Suhartono (2000 :12) ditinjau dari segi ekonomi desa merupakan sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantugan yang besar dibidang sosial ekonomi. Pendapat diatas menjelaskan bahwa desa merupakan kelompok sosial ekonomi kecil yang berasaskan ikatan kekeluargaan dimana rasa saling tolong menolong dan rasa kekawanan sosial lebih diutamakan.

 Menurut Kansil (2001 : 21), desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelengarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.

 Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan. (Sadu Wasistiono, 2007 :69).

 Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasanya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah-daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda kulturnya.

Kewenangan desa menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah berd asarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah.
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Menurut Undang-undang ini juga menjelaskan Pemerintah desa sendiri dari :

1. Kepala desa dan perangkat desa
2. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya
3. sekertaris desa terdiri dari sekertaris desa atau pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Dalam pasal 203 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung dari penduduk desa warga Republik Indonesia, dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan. Desa dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan dan sebagai pemerintahan yang paling dekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Disamping itu sebagai pemimpin, kepala desa juga memiliki fungsi sebagai pelopor, penggerak, perencana, penggagas, bahkan sebagai pelaksana pembangunan didesa yang dipimpinnya.

Menurut Henry Pratt Fairchild dalam Kartini Kartono (2006 :38), pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi.

Berdasarkan beberapa definisi kepemimpinan diatas jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin sangatlah berat karena ia harus membawa perubahan desa yang dipimpinnya kearah yang lebih baik, sebab bila salah langkah desa yang dipimpinnya akan menjadi tidak berkembang bahkan mengalami ketertinggalan dari desa-desa lainnya. Kepala desa harus benar-benar mengurus, mengatur, mengarahkan dan memimpin serta bertanggung jawab terhadap komitmennya sebelum dia mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin.

Penulis berpendapat yang dimaksud pemimpin dalam hal ini adalah seorang pemimpin juga harus memiliki sikap transparansi terhadap masyrakat yang dipimpinnya sehingga tidak terjadinya kesalah pahaman informasi, dan lebih memperhatikan masyarakat karena pada saat sekarang masyarakat banyak menggantung perkembangan pembangunan desa pada pemerintah daerah sepenuhnya.

Jadi tanggung jawab pemerintah daerah atau kepala desa harus sesuai dengan visi, misi awal kepala desa. Yang dimaksud yaitu kepala desa yang berada di Desa Mawai Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur yang mengatur dan mengurus pembangunan didesanya masing-masing.

**2.1.2 Pengertian Pembangunan**

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin Ilmu pengetahuan terdiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut nation-building Sondang P. Siagian (2001 : 4) administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

 Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006 :15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangun itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

 Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2008) pembangunan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

 Mencermati beberapa definisi dalam pembangunan diatas sesuai dengan pemahaman penulis, maka yang dimaksud dengan pelaksanaan pembangunan dalam penelitian ini adalah seseorang dalam hal ini Kepala Desa sebagai “pelaksana pembangunan” didesa yang dipimpinnya, harus mampu mengimplementasikan fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, serta mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efesien. Disamping menjalankan tugasnya sebgai kepala desa, merencanakan program pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakatnya juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang urgen dan strategis demi tercapainya program pembangunan pedesaan

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris “Police” yang artinya keputusan yang diambil dan didasari oleh pertimbangan serta aturan-aturan tertentu. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Edi Suharto, 2005 :7)

Freeman dan Sherwood (2005 :32) mengatakan kebijakan dibagi dalam tiga tahap yaitu pertama tahap Identifikasi, kedua tahap Implementasi, ketiga tahan Evaluasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing tahap diantaranya :

1. Tahap Identifikasi.

Tahap ini kepala desa melakukan pendekatan-pendekatan dan pengidentifikasian terhadap program pembangunan yang direncanakannya. Tahap-tahap tersebut meliputi :

1. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kepala desa melakukan pendekatan kepada masyarakat, hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan mengambil keputusan yang urgen serta memberikan solusi pada permasalahan masyarakat.

1. Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan yang diambil lalu di informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan mau ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa.

1. Penginformasian rencana dan kebijakan kepada masyarakat.

Kebijakan yang diambil lalu di informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan mau ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa.

1. Perumusan tujuan kebijakan yang akan ditetapkan.

Kebijakan yang diputuskan perlu dirumuskan dan ditetapkan dalam musyawarah desa agar tercapai tujuan yang diinginkan.

1. Pemilihan model kebijakan yang paling tepat.

Kepala desa dalam merumuskan kebijakannya juga perlu memilih model kebijakan atau keputusan yang diambil, supaya keputusan tersebut tepat dan mengenai sasaran.

1. Penentuan indikator.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan pedesaan, dipandang perlu seorang kepala desa menentukan indikator-indikator keberhasilan pembangunan desa yang dipimpinnya.

1. Membangun dukungan dan legitimasi masyarakat.

Terakhir yang perlu di identifikasi adalah membangun dukungan dan legitimasi masyarakat, agar masyarakat berperan serta dalam pembangunan.

1. Tahap Implementasi.

Setelah kepala desa melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, tahap selanjutnya melakukan implementasi kebijakan yang diambilnya. Tahap ini kepala desa merumuskan kebijakan yang diambil dan merancang serta mengimplementasikan progam yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Perumusan kebijakan yang akan diambil

Kebijakan yang telah diambil lalu dirumuskan dalam program pembangunan pedesaan. Dengan kata lain pembangunan seperti apa yang diinginkan.

1. Perancangan dan implementasi program yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan rumusan yang dibuat, maka dilakukanlah rancangan kegiatan dan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

1. Tahap Evaluasi

Penilaian dan tindak lanjut dari pembangunan yang dilaksanakan dianggap perlu sebagai keberhasilandalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu: Evaluasi hasil dan tindak lanjut. Pada tahap ini, kepala desa selaku pengawas dan pengevaluasi terhadap pembangunan yang dilaksankan melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, agar setiap kendala-kendala dilapangan bisa ditindak lanjut sebagai penyempurnaan dari hasil pembangunan.

 Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010 :20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro, 2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkat kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

 Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001 :47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yumono (2001 :54).

 Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarkat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanan pembangunan.

Contoh dari pembangunan fisik adalah:

1. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan
2. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar
3. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak berwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

1. Pembangunan bidang keagamaan
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
5. Pembuatan surat keterangan berdomisili

**2.1.3 Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan**

Talizuduhu Ndraha (2005 :5) mengatakan bahwa fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah:

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa. Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.
2. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil harus lah tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternative terbaik untuk masyarakat.
3. Mampu mengkoordinir penyelengaraan pembangunan desa, mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penetuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas ,tata kerja, tanggung jawab, dan atara relasi dari masing-masing fungsi) sehingga merupakan suatu

totalitas sistem, dimana bagian yang satu menunjang dua bergantung pada bagian yang lainnya.

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan pembangunan

Kepala Desa

1. Membuat perencanaan pembangunan
2. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan
3. Mengkoordinir penyelengaraan

pembangunan

Pembangunan yang ada di desa

1. Gedung Sekolah
2. Puskesmas
3. Rumah Ibadah

**METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif (kualitatif), artinya suatu cara penelitian dengan menitik beratkan pada pemaparan baik dari hasil wawancara maupun melalui dokumentasi bukan dari hipotesis-hipotesis yang diukur dengan angka-angka.

 Sugiyono (2014 : 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk peneliti padad kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya dalah eksperimen) diman peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/interaktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

 Sugiyono (2014 : 292) perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data situasi sosial tersebut dijaring oleh penelitian kunatitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

**3.2 Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, di dasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang di ketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang di hubungi di sesuaikan dengan kreteria-kreteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. (Zuriah, Nurul, 2006 :124)

1. Kepala desa
2. Sekertaris desa
3. Kaur pembangunan
4. Masyarakat 5 orang

**3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian kualitatif menggunakan empat teknik utama dalam penyelidikannya, yaitu participant observation in dept interview, dokumentasi, dan triangulasi Sugiyono (dalam Prastowo, Andi, 2012 :42). Sementara itu, Nasution (dalam Prastowo, Andi, 2012 :42) menjelaskan bahwa dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara. Kemudian ia juga tidak menggunakan tes atau angket karena dengan demikian akan mengambil jarak dengan sumber data. Semua itu pada hakikatnya ditujukan, yaitu untuk mengutamakan diperolehnya data langsung atau first hand. Metode ini menggunakan teknik-teknik penelitian, seperti eksperimen, survey kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. (Prastowo, Andi, 2012 :42)

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Margono (dalam Zuriah, Nurul, 2006 :173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek. Penelitian pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observasi sebagai pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya. Namun demikian, dalam melakukan observasi peneliti dituntut memiliki keahlian dan penguasaan kompetensi tertentu. (Zuriah, Nurul, 2006 :173)

Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat dilapangan tentang fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.

1. Metode Wawancara

 Wawancara atau interview menurut Black dan Champion (dalam Zuriah, Nurul, 2006 :179) adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik penelitian sosial. Hal ini dikarenakan bentuknya yang berasal dari interaksi verbal anatara peneliti dengan responden.

 Suatu wawancara dapat disifatkan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi di mana sejumlah variabel memainkan peranan yang penting karena variabel tersebut dapat mempengaruhi dan menentukan hasil wawancara, variabel tersebut ialah (1) pewawancara (interview), (2) responden (interviewee), (3) materi wawancara, dan (4) hubungan antara pewawancara dengan responden.

 Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih. Di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

 Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee). (Zuriah, Nurul, 2006 :179)

 Wawancara akan mendapat data primer dari pihak yang akan diwawancarai lebih akurat, untuk data pelaksanaan pembangunan.

1. Metode dokumentasi

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), keriteria, biografi, peraturan, kebijakan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, filim dan lain-lain. Studi dokementasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2017 :329)

 Melalui teknik dokementasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada ditempat lokasi penelitian.

**3.4 Fokus Penelitian**

Sugiyono (2014 : 207), menyatakan salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian berdasarkan gejala tersebut penelitian kualitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitian berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang teliti yang meliputi aspek tempat (place) dan aktivitas (aktivity) yang berinteraksi secara sibergis.

 Karena terlalu luas masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

 Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga yang masih bersifat sementaradan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : “Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan”.

Indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Membuat perencanaan pembangunan.
2. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.
3. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan.

**3.5 Teknik Analisa Data**

Taylor and brogan (dalam Martono, Nanang, 2015 :10) mendefinisikan analisis data sebagai sebuah proses yang merinci usaha formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. (Martono, Nanang, 2015 :10)

 Untuk penelitian kualitatif, ada banyak metode analisis data. Miles dan Huberman (dalam Martono, Nanang, 2015 :11) dalam bukunya “Qualitative data Analysis: An Expanded Sourcebook” menjelaskan bahwa secara umum, proses analisis dan kualitatif melibatkan empat proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara berulang karena proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan kapan saja, dalam arti proses ini tidak harus dilakukan ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh penelitian.

Keempat proses penting tersebut di gambarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. (Sugiyono, 2007 :338)

1. Data Display (penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkatan, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. (Sugiyono, 2017 : 341)

1. Verification (penarikan kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2017 : 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

**Gambar 3.5.1 Analisis data**

**3.6**

**Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa yang beralamat Jl. Manggis Rt 01 Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilihat pada daftar sebagai berikut.

1. Tanggal 21 September 2020, penulis mengajukan judul skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, sekaligus memohon kesediaan nya untuk menunjuk dosen pembimbing.
2. Pada tanggal 22 September 2020 dosen pembimbing skripsi menyetujui judul, dan penulis mengerjakan proposal skripsi kepada pembimbing.
3. Pada tanggal 30 September 2020 penulis berkonsultasi kepada pembimbing I dan pembimbing II
4. Pada tanggal 1 Oktober – 15 Oktober 2020 penulis melakukan revisi proposal.
5. Pada tanggal 6 November 2020 penulis melakukan ujian seminar proposal.
6. Pada tanggal 7 November 2020 penulis melakukan revisi setelah ujian seminar proposal.
7. Pada tanggal 6 Desember 2020 penulis mengerjakan bab 4 hasil peneltian dan pembahasan serta berkonsultasi kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II.
8. Pada tanggal 18 – 27 januari 2021 penulis melakukan revisi hasil penelitian.
9. Pada tanggal 26 februari 2021 penulis melakukan ujian hasil penelitian.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Desa Mawai Indah termasuk dalam kecamatan Batu Ampar dengan luas wilayah 12.891.5 ha. Adapun batas wilayah Desa Mawai Indah adalah :

1. Sebelah Utara : Beno Harapan Kecamatan Batu Ampar
2. Sebelah Selatan : PT Sinar Mas Kecamatan Muara Bengkal
3. Sebelah Timur : Himba Lestari Kecamatan Batu Ampar
4. Sebelah Barat : Telaga Kecamatan Batu Ampar

Pada tahun 2017 Desa Mawai Indah memiliki 07 RT kemudian kepemimpinan Kepala Desa Mawai Indah semakin tahun mengalami perubahan gaya kepemimpinan, mulai berdirinya tahun 1993 sampai sekarang jumlah penduduk sebanyak 912 jiwa, laki-laki sebanyak 468 jiwa, perempuan sebanyak 444 jiwa, dan jumlah KK 227.

Tabel 4.1 **Nama Kepemimpinan Kepala Desa Mawai Indah dari tahun 1993 sampai sekarang.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Murniagdiat |
| 2 | Hasanuddin |
| 3 | Robert Andriansyah Pangaribuan |

*Sumber data : Kelurahan Desa Mawai Indah*

**4.1.1 Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa**

Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam pasal 6 sebagai berikut :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintah desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**4.1.2 Fungsi Kepala Desa Mawai Indah Dalam Pembangunan**

 Membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa, perencenaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat suatu perencanan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut. Kepala desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

 Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, pengambil keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih dalam pengambilan keputusan yang baik kepala desa harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar kebutuhan masyarakat.

Mampu mengkoordinir penyelengaraan pembangunan desa, mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penetuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas ,tata kerja, tanggung jawab, dan atara relasi dari masing-masing fungsi) sehingga merupakan suatu totalitas sistem, dimana bagian yang satu menunjang dua bergantung pada bagian yang lainnya.

**4.2 Hasil Penelitian**

 Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 8 responden yang terdiri dari 3 orang perangkat desa dan 5 masyarakat, berikut ini akan disajikan data-data penelitian yang berkenaan dengan hal tersebut :

 Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan didesa yang diharapkan, keterlibatan seluruh mayarakat dan perangkat desa sebagai pelaku pembangunan. Keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan fisik dengan turun langsung kelapangan untuk membantu proses pengerjaan pembangunan yang telah direncanakan oleh kepala desa. Berikut ini akan disajikan data-data penelitian yang berkenaan dengan hal tersebut :

Hasil wawancara penulis bersama Bapak **Robert Andriansyah Pangaribuan** beliau adalah Kepala Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar, Tanggal 08 Desember 2020. Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam jabatannya kepala desa mempunya visi misi untuk membangun desa ini. Selama kepala desa beserta staff menjabat awal tahun 2021 ini dari segi dana yang masuk ada 3 alokasi yaitu dana ADD, dana desa dari APBN dan dana hasil dari pajak. Untuk membangun kepala desa memfokuskan satu insfrastuktur yaitu PLN dan air bersih , yang menjadi sumber dasar untuk air bersih sendiri sudah ada untuk mengurus PAMDES (pembangunan air minum desa) sudah mulai diaktifkan. PLN Alhamdulillah kita mendapatkan informasi tahun depan ada pengusulan jaringan telekomunikasi, kepala desa memfokuskan untuk ekonomi masyarakat yang mayoritas di desa kami ini adalah petani, dan untuk pembangunan khususnya untuk gendung Sekolah, puskesmas dan rumah ibadah. Kendala nya itu banyak yang paling utama SDM (sumber daya manusia) maklum kita hidup di desa ini tidak semua nya mengerti, kadang-kadang prokontak selalu ada tapi kita tidak apa-apa ya Alhamdulillah sesuai aturan apabila ada yang bertanya kurang jelas kita jelaskan lagi, kami mempersilah kan jika kurang jelas bisa di tanyakan langsung ke BPD dan Kecamatan”

 Dari pertanyaaan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yaitu PLN dan air bersih selain itu kepala desa melakukan pengusulan jaringan telekomunikasi agar masyarakat tidak terkendala dalam melakukan berbagai aktivitas, kepala desa juga memfokuskan pada perekonomian masyarakat khusus petani yang awalnya menjual hasil mentahan dari hasil panen menjadi bahan olahan. Bagunan yang tersedia didesa yaitu gedung sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah.

Kendala dalam pelaksanaan pembangunan yang paling utama adalah SDM (sumber daya manusia) tidak semua masyarakat di desa mengerti apayang di sampaikan sehingga sering terjadi prokontak namun staff desa selalu menjalan kan sesuai aturan yang ada, masyarakat di ijinkan bertanya jika ada yang kurang jelas. Jika masyarakat ingin menanyakan kepada BPD dan Kecamatan di persilahkan.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu staff kantor desa kaur pembangunan yang bertugas membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembangunan dan termasuk menampung aspirasi masyarakat.

Hasil wawancara penulis bersama Bapak **Wedi** selaku kaur pembangunan. Wawancara, Tanggal 08 Desember 2020. Beliau mengatakan bahwa :

“Untuk pembangunan yang diinginkan harus diprogram dan disusun sesuai dengan anggaran yang ada, kalau anggarannya memadai bisa dilaksanakan dengan maksimal dan jika anggarannya tidak memadai kita bisa melakukan gotong-royong sehingga kita bisa merawat gedung yang sudah ada, namun untuk sekarang terkendala dimasa covid-19 menjadi terhambat. Program yang akan disusun harus dirembukkan pada setiap ketua RT dan setelah itu dibawa lagi ke pra musrembang setelah disetujui dan anggaran keluar baru bisa dilaksana kan.”

 Dari pertanyaan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang diinginkan harus terprogram dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, jika anggaran tidak memadai maka masyarakat melakukan bergotong-royong untuk merawat bangunan yang sudah ada.

Dimasa covid-19 ini segala sesuatu nya menjadi terhambat yang termasuk proses pembangunan, maka program yang akan disusun terlebih dahulu harus dirembukkan kepada setiap RT yang sifat nya mewakili setiap warganya untuk menyampaikan aspirasi, setelah itu kaur pembangunan membawa lagi ke pra musrembang setelah proses itu disetujui dan anggaran keluar maka bisa dilaksanakan semua program yang sudah dirembukkan terlebih dahulu sesuai anggaran yang tersedia.

 Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu ketua RT yang bertugas mewakili setiap warga nya untuk menyampaikan sebuah aspirasi yang sudah di rembukkan dan menyampaikan apasaja yang diperlukan dalam suatu ruang lingkup RT tersebut.

Hasil wawancara penulis bersama Bapak **Yanuarius Kadha** selaku masyarakat sekaligus ketua RT, Wawancara Tanggal 07 Desember 2020, Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam perencanaan pembangunan selalu mengikut sertakan masyarakat, kelompok tani dan kelompok-kelompok yang ada didesa semua diikut sertakan dalam misalnya menyusun anggaran pembangunan pertahunnya, setelah itu dikumpulkan setiap warga menanyakan apa yang mau dibangun misalnya parit dan jalan setelah disepakati, baru ketua RT menyerahkan kedesa baru sampai desa dirembukkan lagi didesa dan mana yang di prioritaskan baru itu yang dibangun kan”.

 Dari pertanyaan wawancara diatas disimpulkan bahwa dalam melakukan perencanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi didalam nya, ketua RT memberikan kesempatan untuk warga beragumentasi dalam menyampaikan apa saja yang diperlukan dalam ruang lingkup RT seperti parit dan jalan, setelah itu ketua RT menyerahkan ke kantor desa mana yang diprioritaskan dan dibangun terlebih dahulu.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang sepenuhnya mengetahui dan merasakan hasil pembangunan infrastruktur

Hasil Wawancara penulis bersama Bapak **Ismanto** selaku masyarakat. Wawancara, Tanggal 07 Desember 2020 beliau mengatakan bahwa :

“Sudah sesuai dengan program yang direncanakan dan dimusyawarahkan di desa, Kepala desa merencanakan pembangunan melalui musyawarah desa dengan dari acuan masyarakat, kan pembangunan infranstruktur tidak satu bidang misalnya paret, gorong-gorong, semenisasi jalanan digang, dan juga pembangunan itu tidak dijalankan setiap tahunnya melalui RAKORBANDES dan dibiayai dana ADD. Pembangunan infranstruktur juga sangat berpengaruh untuk desa yang dulunya sepi sekarang menjadi lumayan ramai setelah jalanan desa dibangun, tidak hanya ramai dan menjadi jalan penghubung dari desa menuju ke kota”.

 Dari pertanyaan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa suatu program yang di rencanakan di desa terlebih dahulu di musyawarahkan terhadap masyarakat, pembangunan infrastruktur tidak hanya satu bidang saja yang dibangun, dan pembangunan infrastruktur itu tidak dijalankan setiap tahunnya. Pembangunan infrastruktur dibiayai oleh dana ADD, pembangunan infrastruktur juga sangat berpengaruh untuk desa terutama pada jalanan yang dulunya sepi menjadi lumayan ramai dan menjadi jalan penghubung antara desa ke kota.

**4.3 Pembahasan**

Kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan diwilayah desa. Oleh Karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan didesa tergantung dari kinerja kepalada desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta didalam pembangunan. Sebagaimana pembangunan didesa, yang diatur dalam pasal 3 Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa ditegaskan bahwa pembangunan desa sebagaiman maksudnya dalam pasal 2 mencakup bidang penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Setelah analisa diatas maka selanjutnya melakukan pembahasan hasil penelitian dari uraian wawancara yang penulis lakukan diatas bahwa dalam jabatannya kepala desa memiliki visi misi program kerja untuk membangun desa dan di selaraskan dengan RPJMDES yang sudah ada karena RPJMDES tidak dihapus kan artinya tetap dibagikan dengat menyerap aspirasi, dan kepala desa sifatnya adalah penentu kebijakan.

Dalam pemerintah desa dari segi dana yang masuk ada 3 alokasi dana yaitu, dana ADD, dana desa dari APBN dan dana dari hasil pajak. Kepala desa memfokuskan pembangunan desa menggunakan dana desa. Pada tahun pertama menjabat sedikit ada kendala dari kabupaten karena defisit anggaran, sehingga berhimbas kedesa dan menjadi keterlambatan proses pembangunan.

Kepala desa memfokuskan satu infrastuktur dasar seperti PLN dan air bersih sebagai sumber dasar, awal tahun 2021 kepala desa mendapatkan informasi usulan jaringan telekomunikasi agar masyarakat tidak terkendala dalam melakukan berbagai aktivitas, kendala utama dalam infrastruktur yaitu SDM, masyarakat tidak semuanya mengerti sehingga sering terjadi pro kontak namun aparatur desa telah memaklumi.

Pada pasa pandemic covid-19 kebutuhan dasar ekonomi melemah selain infrastruktur kepala desa juga ingin mewujudkan hasil panen dari lahan pertanian masyarakat bisa menjual bukan lagi berupa bahan mentah melainkan hasil olahan.

Dalam proses pembangunan desa, kaur pembangunan membuat program pembangunan yang sudah diprogramkan terlebih dahulu untuk memakasimalkan anggaran yang memadai, jika anggaran tidak memadai kita melakukan gotong royong untuk menjaga gedung-gedung yang sudah ada.

Dimasa covid-19 ini segala sesuatu nya menjadi terhambat yang termasuk proses pembangunan, maka program yang akan disusun terlebih dahulu harus dirembukkan kepada setiap RT yang sifat nya mewakili setiap warganya untuk menyampaikan aspirasi, setelah itu kaur pembangunan membawa lagi ke pra musrembang setelah proses itu disetujui dan anggaran keluar maka bisa dilaksanakan semua program yang sudah dirembukkan terlebih dahulu sesuai anggaran yang tersedia.

Proses penyusunan rencana kegiatan desa (RKD) khususnya dalam pembangunan, kaur pembangunan menanyakan terlebih dahulu kepada setiap ketua RT dan menanyakan apa saja keperluan-keperluan yang dibutuhkan setelah itu dibawa ke pra musrembang, setelah musrembang menyetujui, begitu anggaran sudah keluar kita bisa melaksanakannya.

Dalam setiap pembangunan kepala desa mengikut sertakan masyarakat, dan kelompok tani. Kepala desa melakukan rembukan kepada setiap RT, dalam satu lingkungan RT mempunyai rencana untuk membuat parit dan jalanan setelah warga menyepakati baru diserakan ke desa sampai di desa di rembukan lagi, setelah itu desa memutuskan mana yang di prioritaskan terlebih dahulu dan melakukan pembangunan tersebut.

Selain mengusulkan jalan dan paret, masyarakat paling tidak merasakan infrastruktur dasar seperti bangunan posyandu, pusban, dan sumur PAMDES. Karena apapun betuknya program selalu ada di musrembang. Jika tidak ada dimusrembang kepala desa tidak berani menjalankan karena takut menyalahgunakan anggaran.

Fasilitas dan infrastruktur yang tersedia sangat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat, apapun yang dilakukan dan direncanakan sudah ada di musrembang desa jadi kepala desa tidak akan mungkin menyalah gunakan anggaran. Saat mengadakan musrembang kepala desa juga mengundang RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

Dalam pencapain penyelenggaraan pembangunan belum maksimal karena adanya pemerataan pembangunan didesa pembangunan tidak hanya satu saja yang dibangun. Dari pembangunan fisik sangat berpengaruh untuk desa yang dulunya sepi sekarang menjadi lumayan ramai setelah jalanan desa dibangun tidak hanya mulai ramai dan menjadi jalan penghubung dari desa ke kota.

**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

 Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

 Kepala desa dalam jabatannya mempunyai visi misi program kerja untuk membangun desa dan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pemerintahan desa ada 3 alokasi dana yaitu dan ADD, dana desa dari APBN dan dana dari hasil pajak kepala desa memfokuskan pembangunan desa menggunakan dana desa.

 Kepala desa memfokuskan satu infrastruktur dasar seperti PLN dan air bersih, kepala desa mendapatkan informasi usulan jaringan telekomunikasi, kendala utama dalam infrastruktur yaitu SDM. Pada masa pandemic covid-19 kebutuhan dasar ekonomi melemah selain infrastruktur desa juga ingin mewujudkan hasil panen bukan lagi berupa bahan mentah melainkan hasil olahan.

 Proses pembangunan desa kaur pembangunan membuat program pembangunan yang sudah diprogramkan untuk memaksimalkan anggaran yang memadai, jika anggaran tidak memadai aparat desa dan masyrakat melakukan gotong-royong menjaga bangunan yang sudah ada.

Fasilitas dan infrastruktur yang tersedia sangat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat, apapun yang dilakukan dan direncanakan sudah ada di musrembang desa jadi kepala desa tidak akan mungkin menyalah gunakan anggaran. Saat mengadakan musrembang kepala desa juga mengundang RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

 Khususnya dalam pembangunan kepala desa mengikut sertakan masyarakat dan kelompok tani dan melakukan rembukan kepada setiap RT untuk menanya kan apasaja yang dibutuhkan dalam ruang lingkup RT seperti, jalanan dan parit. Selain mengusulkan jalanan dan parit masyrakat paling tidak merasakan infrastruktur dasar seperti bangunan, posyandu, pusban dan sumur SEPAMDES. Dalam pencapaian penyelenggaraan pembangunan belum maksimal karena adanya pemerataan, dari pembangunan fisik sangat lah berpengaruh untuk desa.

**5.2 Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk kepala desa dalam melakukan pelaksanaan pembangunan di desa mawai indah.

1. Diperlukan optimalisasi kepala desa dengan upaya memaksimalkan untuk merangsang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan. Tercapainya hidup sejahtera kepada semua masyarakat Desa Mawai Indah, diharapkan kepala desa tetap membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya.
2. Dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa hendaknya selalu mengontrol kegiatan pembangunan dan segera menindak tegas bila ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Prastowo, 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,* Yogyakarta

Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara,* Bumi Aksara : Yogyakarta

Erwan, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial,* Gaya Media: Jakarta

Dunn,William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta

Kansil, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta

Kartono, Kartini, 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawai: Jakarta

Kuncoro, Mudrajad, 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM, YKPN*, Yogyakarta.

Martono, Nanang, 2015. *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*, PT Raja Grafindo

Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet VI: Jakarta

Nurul, 2006. *Metode Penelitian dan Pendidikan*, PT Bumi Aksara: Jakarta

Ndraha Taliziduhu, 2005. *Teori Budaya Organisasi,* Cetakan Pertama PT Rineka Cipta, Jakarta.

Siagian P. Sondang, 2004. *Prinsi-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara: Jakarta

Suhartono, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika ADITAMA: Bandung

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian*, Alfabet: Bandung

Sugiyono, 2010. *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabet: Bandung

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, Alfabet: Bandung

Siagian P. Sondang, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara: Jakarta

Siagian P. Sondang, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Edisi Pertama), ANDL: Yogyakarta

Siagian P. Sondang, 2003. *Teori& Praktek Kepemimpinan*, Renika Cipta: Jakarta

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2008. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES: Jakarta

Siswoyo, 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.

Sadu Wasistiono, 2007. *Prospek Pembangunan Desa.* Bandung

Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Publik,* PT. Raja Grafindo Persada

Teguh Yuwono, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak),* UNDIP, Semarang

Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah*: Jakarta

Wresniwiro, 2012. *Beberapa Aspek Penggunaan Zat Psikioakti*f, Jurnal Psikologi, Rohima Press: Jakarta

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* PT. Bumi Aksara, Jakarta

**Internet :**

Dosen Pendidikan. 2020. *26 Pengertian Teori Menurut Para Ahli Terlengkap*

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/> (diakses 26 Oktober 2020)

Guru Pendidikan. 2019. *Pengertian Konsep Menurut Para Ahli*

<https://seputarilmu.com/2019/12/pengertian-konsep-menurut-para-ahli.html> (diakses 12 Desember 2019)